

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN**





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. A. Yani Km. 4,5 Telp./Faks. (0526) 2028060 Kel. Batu Piring
Kec. Paringin Selatan 71618

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 800/028.4/Kpts/Ka/BKPSDM/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan;
2. Menyusun Rancangan Awal, Rancangan Rencana Kerja, dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan;
3. Melaksanakan penyelarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan komponen Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
4. Menetapkan target indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 dan 2023; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parangin
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19681012 198903 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Nomor 800/028.4/Kpts/Ka/BKPSDM/2022 Tanggal 31 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BALANGAN

No.	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan	Ketua/Koordinator
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN	Anggota
5.	Kabid Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Anggota
6.	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Dikeluarkan di Paringin
pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan Tahun 2023 dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT, dengan harapan agar kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur serta program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta hasil pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Renja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Renja tersebut juga merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dalam proses perumusan/penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebaik mungkin. Namun dikarenakan keterbatasan dalam berbagai hal, kami menyadari bahwa dokumen tersebut masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dokumen di masa mendatang. Semoga Renja yang disusun bermanfaat dan berkontribusi terhadap upaya perbaikan berkelanjutan pada BKPSDM Kabupaten Balangan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan dan tidak dapat disebutkan satu per satu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pihak-pihak dimaksud. Semoga kerja sama yang terbangun dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Paringin, Juli 2022

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Sistematika Penyusunan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPd.....	26
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	36
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	38
C. Program dan Kegiatan.....	38
D. Analisis Sosial Ekonomi.....	55
BAB V PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

No.	Judul Tabel/Gambar	Halaman
2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 BKPSDM Kabupaten Balangan	9
2.2.	Evaluasi Hasil Identifikasi dan Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2022 serta Tindak Lanjut pada Tahun 2023	18
2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan	23
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 BKPSDM Kabupaten Balangan	29
2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 BKPSDM Kabupaten Balangan	36
3.1.	Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024	38
3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 BKPSDM Kabupaten Balangan	41

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui pengkajian kondisi riil dan empiris BKPSDM Kabupaten Balangan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan.

A. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan serta langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur. Sehingga Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,

mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2021 dan reviu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan tahun 2022 yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan kegiatan secara konkret dan terukur selama kurun waktu satu tahun rencana.

D. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2021 merencanakan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditekankan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang manajemen ASN dan pengembangan SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan pegawai. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, sebagian besar pelaksanaan Renja sudah sesuai dengan jalur yang ditetapkan (*on the track*). Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator masing-masing pada tahun 2021 yang sebagian besar terealisasi 100%. Hasil pengukuran kinerja juga menunjukkan adanya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berhasil melampaui target yang direncanakan pada tahun tersebut.

Capaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota pada tahun 2021, yaitu Nilai Akuntabilitas SAKIP, dapat dicontohkan sebagai salah satu pelaksanaan Renja yang telah melampaui target. Indikator tersebut pada tahun 2021 hanya ditarget memperoleh nilai evaluasi sebesar 64 dengan predikat B (baik), tetapi dalam realisasinya mencapai nilai 71,38 dengan predikat BB (Sangat Baik). Indikator dimaksud pada tahun 2022 bahkan telah melampaui target akhir periode Renstra pada tahun 2026. Target akhir indikator dimaksud pada tahun 2026 adalah memperoleh nilai evaluasi sebesar 72 dengan predikat BB (Sangat Baik), tetapi BKPSDM pada tahun 2022 telah memperoleh nilai sebesar 75,79 dengan predikat BB (Sangat Baik). Sehingga indikator tersebut pada tahun 2022 telah mencapai 105,26%.

Contoh pelaksanaan kegiatan yang telah melampaui target Renja adalah Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru

dan tenaga kesehatan). Indikator tersebut pada tahun 2021 hanya ditarget sebesar 27%, tetapi pengukuran yang dilakukan menunjukkan capaian kinerja 62,11%. Capaian kinerja pada tahun 2021 tersebut juga telah melampaui target akhir periode Renstra yang ditetapkan sebesar 45% pada tahun 2026. Akan tetapi adanya kebijakan Penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional yang diimplementasikan akhir tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Balangan masih harus diantisipasi dampaknya oleh Bidang Pengembangan SDM sebagai pemangku indikator tersebut. Oleh sebab itu, BKPSDM pada tahun 2022 hanya menargetkan 35% dari ASN berjenis jabatan Administrasi dan Fungsional (di luar tenaga guru dan kesehatan) yang dapat memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan. Hal tersebut telah mencermati dan mempertimbangkan berbagai dinamika yang dihadapi pada upaya pengembangan kompetensi pegawai di Kabupaten Balangan.

Terdapat pula beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2021 yang belum optimal dan sesuai dengan target Renja. Hasil evaluasi beberapa indikator bahkan perlu mendapat perhatian khusus dari pimpinan, misalnya sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi yang tidak terealisasi sama sekali atau 0%. Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan penyebab terjadinya hal tersebut adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang menginstruksikan agar adanya cadangan anggaran yang sewaktu-waktu dapat *di-refocussing* untuk mengatasi dampak Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional/daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan lain dengan capaian kinerja di bawah 75% pada tahun 2021, yaitu:

1. Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan indikator Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan, capaian kinerja sebesar 59,09%;

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi, capaian kinerja sebesar 53%;
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan indikator Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah, capaian kinerja sebesar 75%;
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat, capaian kinerja sebesar 74,18%;
5. Program Pengembangan SDM dengan indikator Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur (pembatasan indikator hanya pada pemenuhan kompetensi manajerial-kepemimpinan), capaian kinerja sebesar 35,70%;
6. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan indikator Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial, capaian kinerja sebesar 68,75%; dan
7. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan indikator Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural, capaian kinerja sebesar 68,75%.

Gambaran lengkap terkait evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (termasuk proyeksi capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang sedang berjalan) dan pencapaian Renstra s.d. Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
BKPSDM Kabupaten Balangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5														
5	03													
5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM	72	63,18	64	71,38	111,53	65	75,79	105,26
						Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	95,33%	95,33	100%	95,33%	95,33
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	48 dokumen	32 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	16 dokumen	33,33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	24 dokumen	26 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	33,33
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	18 dokumen	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	6 dokumen	33,33
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan	30 laporan	25 dokumen	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	10 laporan	33,33

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%	93,33%	100,00%	100,00%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	28080 eksemplar	60 bulan	4680 eksemplar	4680 eksemplar	100	4680 eksemplar	9360 eksemplar	33,33
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	60 bulan	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	72 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	33,33
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	33,33

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	16,67
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan layak fungsi	100%	100%	100%	90%	90	100%	90%	90
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	100%	-	100%	0%	0	100%	100%	100
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	70%	-	47%	53%	112,77	55,00%	55,00%	78,57
						Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Usulan Pensiun yang disampaikan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	100%	100%	100%	59,09%	59,09	100%	100%	100
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemutakhiran data kepegawaian pada database BKN	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100%	36,12%	100,00%	53%	53	100%	40%	40
						Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode	100%	100%	100%	95,34%	95,34	100%	100%	100
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100%	100%	100%	95,34%	95,34	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	45,00%	-	27%	62,11%	230,04	35%	11,13%	24,73
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	78 orang	-	6 orang	5 orang	83,33	43 orang	48 orang	61,54
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	3050 orang	-	200 orang	359 orang	179,50	850 orang	1209 orang	39,64
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	32 orang	14 orang	8 orang	6 orang	75	4 orang	10 orang	31,25
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	82,85%	-	-	-	-	10%	10%	12,07

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	-	-	-	-	50%	50%	50
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	100%	100%	100%	99,83%	99,83	100%	100%	100
						Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100%	-	100%	74,18%	74,18	100%	100%	100
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP Aparatur yang direviu	90%	-	-	-	-	50%	50%	55,56
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Permohonan Perceraian yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
5	04				Pendidikan dan Pelatihan									

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	100%	56,50%	63,00%	35,70%	56,67	66%	66%	66
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial	100%	100%	100%	68,75%	68,75	100%	100%	100
						Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	30 orang	119	16 orang	11 orang	68,75	6 orang	6 orang	100
						Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Beberapa kebijakan/tindakan korektif yang disarankan dan dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan pencapaian target pelaksanaan Renja dan Renstra, berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (termasuk proyeksi tahun 2022 yang sedang berjalan) dan pencapaian Renstra s.d. Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selain didasari alasan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, publik juga menuntut percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan. Tuntutan tersebut hanya dapat dilakukan oleh ASN yang kompeten;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana BKPSDM Kabupaten Balangan yang berbasis pada kebutuhan dan skala prioritas. Terutama sarana dan prasarana kediklatan dengan tujuan jangka panjang dapat melaksanakan berbagai pengembangan kompetensi ASN di daerah, khususnya pelatihan dengan pola fasilitasi;
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan dan para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
4. Meningkatkan instensitas kerja sama di bidang pengembangan SDM (pendidikan dan pelatihan) dengan berbagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengentaskan masalah masih rendahnya tingkat kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Balangan.

BKPSDM juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang terkait langsung dengan tugas, fungsi, dan wewenang BKPSDM. Prioritas dimaksud, yaitu: "Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara". Analisis dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi pendorong dan penghambat prioritas

tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BKPSDM tidak menjadi satu-satunya SKPD pengampu/penanggung jawab sasaran-sasaran pada prioritas tersebut, sehingga sinergitas dan kolaborasi dengan SKPD lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan menjadi suatu keharusan. Adapun faktor pendorong dan penghambat serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Evaluasi Hasil Identifikasi dan Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2022 serta Tindak Lanjut pada Tahun 2023

Uraian Prioritas dan Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1	2	3	4
Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan sasaran sebagai berikut :			
a. Optimalisasi fungsi dan peran ASN sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 bahwa PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahun; - Komitmen Kepala Daerah terhadap pengembangan SDM Aparatur yang diinterpretasikan pada dokumen Rencana Aksi Pengembangan SDM Aparatur Kab. Balangan Tahun 2022-2024; - Ketersediaan anggaran untuk pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran pengembangan kompetensi yang tersedia pada BKPSDM Kab. Balangan belum mampu memenuhi hak pengembangan kompetensi 20 JP setiap tahun bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; - Terbatasnya kouta peserta Pelatihan Kepemimpinan dari BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan; - Tidak semua pimpinan/pembuat keputusan pada SKPD yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tiap SKPD untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi ASN di satuan kerjanya masing-masing, antara lain dengan mengalokasikan anggaran pelatihan/bimtek/<i>lokakarya (workshop)</i> melalui mekanisme APBD Perubahan; - Menyiapkan dan merumuskan kebijakan yang dibutuhkan untuk memonitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah

Uraian Prioritas dan Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1	2	3	4
	<p>kompetensi yang diharapkan berkontribusi positif terhadap profesionalisme ASN. Di mana kompetensi merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan bobot 40%; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama di bidang kediklatan dengan berbagai lembaga pelatihan, baik instansi pemerintahan maupun swasta. 	<p>mengetahui bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak PNS serta memfasilitasi pemenuhan hak tersebut; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kesadaran (<i>awareness</i>) dan motivasi pada diri pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. 	<p>Kabupaten Balangan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan pemerintahan terakreditasi, khususnya BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan.
b. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	Amanat peraturan perundangan dan kebijakan Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk menempatkan pegawai sesuai dengan prinsip sistem merit dan <i>the right man in the right place</i>	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, baik secara kuantitas atau jumlah pegawai maupun secara kualitas (misalnya: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diharapkan)	Melaksanakan mutasi dan promosi serta penempatan pegawai dengan mengoptimalkan SDM aparatur yang tersedia.
c. Implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh jabatan administrasi (eselon IV) di seluruh Perangkat Daerah	Ketersediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Balangan sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) orang.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas yang belum teranggarkan mengikuti pengembangan kompetensi; dan - Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas di lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Bimtek Gelombang III bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas yang direncanakan berjumlah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang; - Mengusulkan penambahan alokasi anggaran kontribusi

Uraian Prioritas dan Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1	2	3	4
		Pemerintah Kabupaten Balangan belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi yang ditentukan, sesuai dengan jabatan yang dipangku oleh masing-masing pejabat tersebut.	bimtek melalui mekanisme APBD Perubahan TA 2022 bagi 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Fungsional yang belum teranggarkan pengembangannya; dan - Bidang Pengembangan SDM akan bersurat kepada BKN Regional VIII Banjarnasing terkait pelatihan fungsional bagi Pejabat yang terkena dampak Penyetaraan Jabatan Pengawas untuk dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik yang diberikan BKPSDM bersifat *segmented*, karena lebih banyak bersentuhan dengan aparatur/pegawai sebagai bagian kecil dari definisi publik secara umum. BKPSDM memberikan berbagai pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM kepada aparatur/pegawai. Hasil analisis terhadap realisasi kinerja pelayanan tersebut pada tahun 2021 menunjukkan sebagian besar mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator pelayanan Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi bahkan memperoleh capaian kinerja sebesar 179,5%. Salah satu penyebab tingginya capaian indikator dimaksud adalah antusiasme pegawai dalam mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang marak dilakukan secara daring (*online*) oleh berbagai instansi/lembaga, karena adanya

berbagai pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah akibat kondisi Pandemi Covid-19. Pelatihan dan bimtek secara daring tidak membutuhkan biaya yang relatif besar dan lebih fleksibel bagi pegawai.

Kinerja pelayanan yang rendah dan tidak mencapai target pada tahun 2021 adalah indikator Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan. Capaian indikator tersebut hanya 59,09% dari target 100%. Bentuk pelayanan yang diberikan adalah berbagai aktivitas dalam rangka perayaan HUT KORPRI, tali asih anggota yang memasuki purna tugas, santunan musibah anggota (kecelakaan, kebakaran), dan pemberian uang duka wafat. Penyebab rendahnya capaian kinerja pada indikator tersebut adalah pembatasan sosial berupa larangan kerumunan, sehubungan dengan Pandemi Covid-19. Pembatasan dimaksud mengakibatkan berbagai aktivitas yang melibatkan kerumunan orang banyak dalam rangka senam kesegaran jasmani (SKJ) setiap jumat pagi serta apel dan berbagai aktivitas dalam rangka HUT KORPRI (seperti jalan santai dan perlombaan) tidak dapat dilaksanakan.

Indikator dengan capaian rendah lainnya adalah Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural. Target indikator tersebut pada tahun 2021 adalah 16 orang dan hanya terealisasi sebanyak 11 orang atau 68,75%. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama rendahnya kinerja tersebut. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai satu-satunya lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan di Provinsi Kalimantan Selatan meninjau ulang dan memangkas rencana pelaksanaan pelatihan dimaksud akibat adanya Covid-19. Di samping itu, kebijakan *refocusing* anggaran untuk mengatasi dampak Covid-19 menyebabkan pemangkasan terhadap anggaran pelatihan yang telah dialokasikan.

Rincian target kinerja pelayanan BKPSDM pada tahun 2021 s.d. 2024 beserta pencapaian kinerja pelayanan tahun 2021 dan 2022 serta proyeksi capaian tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BKPSDM Kabupaten Balangan

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022*)	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi dilaksanakan mulai dari persiapan, pelaksanaan seleksi, serta evaluasi dan pelaporan
2	Persentase Usulan Pensiun yang disampaikan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan diberikan kepada PNS yang akan memasuki masa pensiun, khususnya mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). Pelayanan juga diberikan untuk pensiun sebab tidak cakap jasmani/rohani, janda/duda meninggal dunia aktif, anumerta, atas permintaan sendiri, dan karena mencalonkan diri
3	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	-	-	100%	100%	100%	100%	59,09%	100%	100%	100%	Fasilitasi yang diberikan berupa berbagai aktivitas dalam rangka perayaan HUT KORPRI, tali asih anggota yang memasuki purna tugas, santunan musibah anggota (kecelakaan, kebakaran), dan pemberian uang duka wafat
4	Persentase pemutakhiran data kepegawaian pada database BKN	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bentuk pelayanan yang diberikan berupa pemutakhiran data ASN melalui aplikasi resmi kepegawaian

5	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan yang diberikan berupa penyelenggaraan pelantikan dan administrasi mutasi pegawai
6	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	-	-	100%	100%	100%	100%	95,34%	100%	100%	100%	Pelayanan yang diberikan berupa fasilitasi kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat mulai dari sosialisasi dan penyiapan sistem, pengumpulan dan verifikasi berkas usulan, pengunggahan bukti fisik, dan penerbitan surat keputusan
7	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	-	-	6 orang	43 orang	12 orang	12 orang	5 orang	43 orang	12 orang	12 orang	Pelayanan diberikan dalam bentuk pengikutsertaan PNS pada kegiatan asesmen yang menjadi rangkaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
8	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	-	-	200 orang	850 orang	500 orang	500 orang	359 orang	850 orang	500 orang	500 orang	Rekomendasi diberikan dalam bentuk pelayanan administrasi Telaahan Staf dan Surat Perintah Tugas bagi ASN yang akan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis
9	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	-	-	8 orang	4 orang	5 orang	5 orang	6 orang	4 orang	5 orang	5 orang	Bantuan berupa beasiswa diberikan kepada ASN yang melaksanakan Tugas Belajar, khususnya Dokter Spesialis
10	Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	-	-	-	10%	19%	18%	-	10%	19%	18%	Pelayanan yang diberikan berupa bantuan biaya kontribusi dalam rangka pengembangan kompetensi PNS jenis jabatan Administrasi
11	Persentase Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	-	50%	60%	70%	-	50%	60%	70%	Pelayanan yang diberikan berupa bantuan biaya kontribusi dalam rangka pengembangan kompetensi PNS jenis jabatan Fungsional

12	Persentase SKP Aparatur yang direviu	-	-	-	50%	60%	70%	-	50%	60%	70%	Pelayanan yang diberikan berupa sosialisasi, layanan konsultasi, <i>coaching clinic</i> , dan reviu terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN
13	Persentase usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	Pelayanan yang diberikan berupa fasilitasi pemberian Satya Lencana Karya Satya (SLKS) bagi ASN
14	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan yang diberikan berupa penyelenggaraan administrasi tindak lanjut atas laporan pelanggaran disiplin serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran disiplin
15	Persentase Permohonan Perceraian yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	Pelayanan yang diberikan berupa penyelenggaraan administrasi tindak lanjut atas permohonan perceraian serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penasihatan untuk meminimalisir perceraian ASN
16	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	-	-	16 orang	6 orang	6 orang	6 orang	11 orang	6 orang	6 orang	6 orang	Pelayanan diberikan dalam bentuk pengikutsertaan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas pada Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan lembaga pemerintah terakreditasi
17	Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan diberikan dalam bentuk pengikutsertaan Calon PNS pada Pelatihan Dasar/Prajabatan dan PPPK pada kegiatan Orientasi yang diselenggarakan lembaga pemerintah terakreditasi

Keterangan :

*) Realisasi capaian kerja tahun 2021 masih bersifat proyeksi (sedang berjalan/*on going*)

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu paling penting dan mendasar di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah masih belum optimalnya profesionalisme ASN, khususnya pada dimensi kompetensi aparatur. Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas SDM Aparatur adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN). Indeks tersebut menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, komposisi persentase tiap dimensi dalam pengukuran IP-ASN adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi pendidikan (25%)
2. Kompetensi (40%)
3. Kinerja (30%)
4. Kedisiplinan (5%)

Jadi, kompetensi aparatur merupakan dimensi dengan persentase terbesar dalam pengukuran IP-ASN. Komposisi 40% dari dimensi kompetensi tersebut diuraikan lagi ke dalam subdimensi yang meliputi: Pelatihan Struktural atau Pelatihan Fungsional (15%), Pelatihan Teknis 20 JP (15%), dan Workshop, Seminar, dan sejenisnya (10%). Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan kompetensi SDM aparatur, jika memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas ASN yang tercermin melalui profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun rentang (*range*) nilai dalam pengkategorian IP-ASN terbagi dalam sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (di bawah 60). Berdasarkan hasil pengukuran, IP-ASN Kabupaten Balangan pada tahun 2019 adalah 62,35% dan mengalami peningkatan menjadi 67,06% pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IP-ASN Kabupaten

Balangan pada tahun 2019 dan 2020 masih termasuk dalam kategori rendah. Hasil penilaian IP-ASN pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan lagi dengan memperoleh hasil 70,16 atau termasuk dalam kategori sedang.

Dimensi kompetensi menjadi salah satu kontributor yang menyebabkan belum optimalnya IP-ASN Kabupaten Balangan. Dimensi tersebut pada tahun 2019 s.d. 2021 memiliki capaian 19,75 (2019), 24,05 (2020), dan 25,57 (2021) dari sebesar proporsi maksimal sebesar 40 dalam pengukuran IP-ASN. Hal tersebut menjadi indikasi adanya permasalahan pengembangan kompetensi ASN yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Balangan.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu permasalahan yang mencuat dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 adalah penataan sistem manajemen SDM-ASN belum optimal. Oleh karena itu, penataan sistem manajemen SDM-ASN ditetapkan menjadi salah satu isu strategis daerah dalam rangka optimalisasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Adapun

Tujuan dan sasaran BKPSDM bersinggungan dengan Misi Keempat dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Nilai SAKIP, Opini BPK, Nilai EKPPD, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran BKSPDM bukan pengampu utama indikator sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. BKPSDM hanya menjadi salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan yang berkontribusi terhadap indikator Nilai SAKIP dan IKM. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun BKPSDM diarahkan dalam rangka pencapaian indikator Nilai SAKIP dan IKM. Review Rancangan Awal RKPD Tahun

2023 menginventarisir 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan serta dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 11.109.815.700,00 (*sebelas miliar seratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah*). Sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, jumlah yang diinventarisir adalah 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 12.339.485.428,00 (*dua belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*). Rincian review Rancangan Awal RKPD selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
BKPSDM Kabupaten Balangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	67 (B)	5.697.135.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	67 (B)	6.343.452.828	
			Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik	100%				Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik	100%		
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	56.963.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	83.459.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	8 Dokumen	16.955.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	8 Dokumen	27.827.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan dengan baik	4 Dokumen	18.357.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan dengan baik	4 Dokumen	27.190.000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	3 Dokumen	21.651.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	3 Dokumen	28.442.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku	100%	4.557.834.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku	100%	4.923.747.000	
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	100%	4.488.035.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	100%	4.832.588.000	
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	51.643.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	64.709.000	
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan	5 Laporan	18.156.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan	5 Laporan	26.450.000	
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan berlaku	100%	671.478.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan berlaku	100%	391.357.328	
1.3.1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%	479.288.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%	86.162.900	
1.3.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4680 Eksemplar	16.343.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4680 Eksemplar	31.547.628	
1.3.3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	175.847.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	273.646.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4.						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100%	322.053.800	
1.4.1.						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor berdasarkan RKBU	100%	322.053.800	
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	235.883.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	409.278.400	
1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	107.793.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	114.000.000	
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	128.090.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	295.278.400	
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	174.976.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	213.557.300	
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan layak fungsi	100%	113.892.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan layak fungsi	100%	119.677.300	
1.6.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	100%	61.084.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	100%	93.880.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku	100%	2.766.022.500	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku	100%	4.564.504.600	
2.1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK ASN	60%	1.063.647.700	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK ASN	60%	395.768.700	
			Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100%				Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100%		
2.1.1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Balangan	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	857.626.800	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Balangan	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	133.942.000	
2.1.2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Balangan	Persentase Usulan Pensiun yang disampaikan	100%	41.502.900	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Balangan	Persentase Usulan Pensiun yang disampaikan	100%	67.933.000	
2.1.3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Balangan	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	100%	22.440.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Balangan	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	100%	55.100.800	
2.1.4.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Balangan	Persentase pemutakhiran data kepegawaian pada database BKN	100%	142.078.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Balangan	Persentase pemutakhiran data kepegawaian pada database BKN	100%	138.792.900	
2.2.	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100%	176.828.600	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100%	173.533.000	
			Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode	100%				Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2.1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Balangan	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	100%	83.228.600	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Balangan	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	100%	82.310.600	
2.2.2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Balangan	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100%	93.600.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Balangan	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100%	91.222.400	
2.3.	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	37%	1.271.150.700	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	37%	3.618.097.900	
2.3.1.	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	12 Orang	105.999.500	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	12 Orang	128.255.700	
2.3.2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	500 Orang	190.232.400	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	500 Orang	1.544.776.000	
			Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI	70 Orang				Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI	70 Orang		
2.3.3.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	5 Orang	394.323.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	5 Orang	454.163.000	
			Persentase ASN yang melaksanakan pendidikan S2/S3	20%				Persentase ASN yang melaksanakan pendidikan S2/S3	20%		
2.3.4.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Balangan	Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	19%	370.797.800	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Balangan	Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	19%	370.760.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3.5.	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Balangan	Persentase Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	60%	209.798.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Balangan	Persentase Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	60%	1.120.142.400	
2.4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang disiplin	100%	254.395.500	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang disiplin	100%	377.105.000	
			Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100%				Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100%		
2.4.1.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Balangan	Persentase SKP Aparatur yang direviu	60%	89.925.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Balangan	Persentase SKP Aparatur yang direviu	60%	124.168.000	
2.4.2.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan (reward)	6 Orang	35.740.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan (reward)	6 Orang	103.675.000	
2.4.3.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Balangan	Persentase usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	100%	36.416.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Balangan	Persentase usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	100%	55.380.000	
2.4.4.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Balangan	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	100%	49.265.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Balangan	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	100%	66.862.000	
2.4.5.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Balangan	Persentase Permohonan Perceraian yang ditindaklanjuti	100%	43.049.500	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Balangan	Persentase Permohonan Perceraian yang ditindaklanjuti	100%	27.020.000	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	69%	2.646.658.100	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	69%	1.431.528.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial/kepemimpinan	100%	2.646.658.100	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial/kepemimpinan	100%	1.431.528.000	
			Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%				Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%		
3.1.1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Balangan	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	6 Orang	2.646.658.100	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Balangan	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	6 Orang	1.431.528.000	
			Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%				Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%		

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tujuan dan sasaran serta tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Balangan tidak berkaitan/bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kelompok yang menjadi sasaran tugas dan fungsi BKPSDM adalah SDM Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Di samping itu, implementasi tugas dan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara prinsip sudah diatur dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan, BKPSDM tidak menghimpun usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau forum sejenis sebagaimana dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan SKPD teknis lain yang *core business* atau tata kelola organisasinya terkait langsung dengan masyarakat.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
BKPSDM Kabupaten Balangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

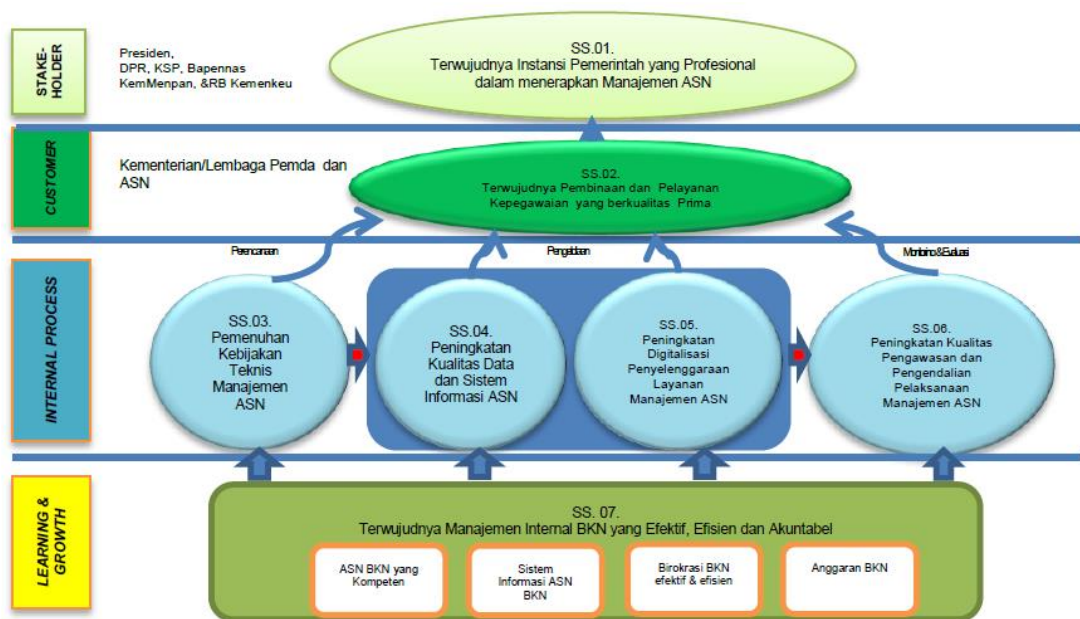
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan kepegawaian di tingkat nasional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kebijakan kepegawaian dalam Renstra BKN Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 5 (lima) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN);
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai BKN adalah:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
2. Manajemen ASN berkualitas prima;
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN;
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN; dan
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.



Gambar 3.1.
Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi mitra kerja BKPSDM Kabupaten Balangan yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan Penerapan Kinerja Individu, dengan indikator Persentase Individu Pegawai dengan Kinerja kategori Baik;
2. Peningkatan penerapan manajemen karir pegawai, dengan indikator Persentase SKPD yang mengidentifikasi kompetensi pegawai; dan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kepegawaian, dengan indikator Indek kepuasan PNS terhadap pelayanan kepegawaian.

Sedangkan sasaran strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

1. Meningkatnya ASN Provinsi Kalimantan Selatan yang berkompeten, dengan indikator Persentase Peningkatan Kompetensi Alumni Diklat Teknis, Manajerial, Latihan Dasar, Fungsional dan Pemerintahan Sesuai Tujuan

Diklat dan Persentase Peserta Diklat yang Memenuhi Standar Kompetensi;
dan

2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan BPSDM, dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan BPSDM.

Berdasarkan hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan mempunyai esensi yang sama dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Letak kesamaan dimaksud adalah manajemen ASN, pengembangan SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Adapun faktor yang harus diantisipasi, yaitu kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi waktu usainya dan berpotensi menghambat koordinasi antarinstansi.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan BKPSDM Kabupaten Balangan adalah meningkatnya profesionalitas ASN, dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN). Sedangkan yang menjadi sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengelolaan aset, dengan indikator nilai SAKIP dan persentase pencatatan pengelolaan aset dalam kondisi baik;
2. Optimalisasi tata kelola dan meningkatnya pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan indikator Indeks Implementasi NSPK Manajemen Kepegawaian, Indeks Sistem Merit, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian.

C. Program dan Kegiatan

BKPSDM Kabupaten Balangan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merencanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Kebutuhan dana yang menjadi pagu indikatif untuk melaksanakan

program, kegiatan, sub kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 12.339.485.428,00 (*dua belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berkonsekuensi pada *mapping* ulang terhadap indikator kinerja sub kegiatan. BKPSDM juga telah melakukan *mapping* ulang sesuai dengan keputusan dimaksud. Adapun rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif tahun 2023 beserta prakiraan maju tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
BKPSDM Kabupaten Balangan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024								
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.				
							Program		Hasil Kegiatan					Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)				Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Tolok Ukur	Target
							Target	Satuan	Target	Satuan				Target	Satuan			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											12.339.485.428				13.339.784.282					
5	03											10.907.957.428				11.836.679.882					
5	03	01					67	(B)				6.343.452.828		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	69	7.002.269.110					
							100	%						Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik	100						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024							
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING			KET.	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
5	03	01	201					100	%					83.459.000				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	116.275.900	
5	03	01	201	01						8	Dokumen	8	Dokumen	27.827.000	APBD			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	30.609.700	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024												
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.					
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)					Tolok Ukur	Target							
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan												
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15	16			17	18			
5	03	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan dengan baik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan					4	Dokumen	4	Laporan	27.190.000	APBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	54.380.000	
5	03	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan					3	Dokumen	3	Laporan	28.442.000	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	31.286.200	
5	03	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku							100	%			4.923.747.000		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku	100	5.416.121.700	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024							
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)					Tolok Ukur	Target		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
5	03	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						100	%	37	Orang/bulan	4.832.588.000	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	5.315.846.800		
5	03	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						100	%	750	Dokumen	64.709.000	APBD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750	71.179.900		
5	03	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5	Laporan	5	Laporan	26.450.000	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	29.095.000		
5	03	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah						100	%			391.357.328		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan berlaku		430.493.060		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024										
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kependagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.			
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kependagri 050-5889 Thn 2021)					Tolok Ukur	Target					
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan										
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15	16			17	18	
5	03	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	Bulan					409.278.400		Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	450.206.240						
5	03	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan			100	%	12	Laporan	114.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	125.400.000	
5	03	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan			12	Bulan	12	Laporan	295.278.400	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	324.806.240	
5	03	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	Bulan					213.557.300		Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	234.913.030						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024										
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.			
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)					Tolok Ukur	Target					
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan										
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15	16			17	18	
5	03	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan layak fungsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan					100	%	20	Unit	119.677.300	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	131.645.030	
5	03	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan				100	%	1	Unit	93.880.000	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	103.268.000		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku					100	%							4.564.504.600		Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku	100	4.834.410.772	
5	03	02	201		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK							60	%				395.768.700		Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	65	435.345.570	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024								
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.				
							Program		Hasil Kegiatan					Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)				Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Tolok Ukur	Target
							Target	Satuan	Target	Satuan				Target	Satuan			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini					100	%						Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100					
5	03	02	201	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						100	%	1	Dokumen	133.942.000	APBD	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	147.336.200		
5	03	02	201	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						100	%	1	Dokumen	67.933.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	74.726.300		
5	03	02	201	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						100	%	1	Lembaga	55.100.800	APBD	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	60.610.880		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024								
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.				
							Program		Hasil Kegiatan					Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)				Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Tolok Ukur	Target
							Target	Satuan	Target	Satuan				Target	Satuan			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
5	03	02	201	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						100	%	1	Laporan	138.792.900	APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	152.672.190		
5	03	02	202		Mutasi dan Promosi ASN										173.533.000		Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi		190.886.300		
																	Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode				
5	03	02	202	01	Pengelolaan Mutasi ASN						100	%	1	Dokumen	82.310.600	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	90.541.660		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024							
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)					Tolok Ukur	Target		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
5	03	02	202	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						100	%	2	Dokumen	91.222.400	APBD		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	100.344.640	
5	03	02	203		Pengembangan Kompetensi ASN										3.618.097.900			Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40	3.793.363.402	
5	03	02	203	02	Pengelolaan Assessment Center						12	Orang	1	Dokumen	128.255.700	APBD		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	141.081.270	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024						
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING			KET.
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif	
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	03	02	203	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN					500	Orang	1	Dokumen	1.544.776.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	1.591.119.280		
					Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI					70	Orang				APBD					
5	03	02	203	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					5	Orang	5	Orang	454.163.000	APBD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	499.579.300		
					Persentase ASN yang melaksanakan pendidikan S2/S3					20	%				APBD					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024											
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.							
							Program		Hasil Kegiatan					Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)				Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Tolok Ukur	Target			
							Target	Satuan	Target	Satuan				Target	Satuan			Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
5	03	02	203	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kab. Balangan					19	%	54	Orang	370.760.800	APBD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	54	407.836.880	
5	03	02	203	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN			Persentase Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Balangan				60	%	217	Orang	1.120.142.400	APBD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	217	1.153.746.672		
5	03	02	204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Persentase ASN yang disiplin						100	%			377.105.000		Persentase ASN yang disiplin	100	414.815.500		
					Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat									100	%					Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024								
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING			KET.		
							Program	Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	Tolok Ukur		Target	Pagu Indikatif
								Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan									
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
5	03	02	204	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						100	%	5	Dokumen	27.020.000	APBD	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5	29.722.000			
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										1.431.528.000					1.503.104.400		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur					69	%			1.431.528.000		Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	72	1.503.104.400			
5	04	02	202		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial/ke pimpinan					100	%			1.431.528.000		Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial/kep emimpinan	100	1.503.104.400			
						Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/					100	%					Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar	100				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2023								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024							
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	KET.
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)					Tolok Ukur	Target		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Pelatihan Dasar																		
5	04	02	202	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan												Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	1.503.104.400		
					Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar						100	%									

D. Analisis Sosial Ekonomi

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tidak berdampak langsung terhadap peningkatan sosial ekonomi, karena tata laksana (*core business*) BKPSDM Kabupaten Balangan adalah manajemen kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur. Jadi pelayanan yang diberikan BKPSDM Kabupaten Balangan bersifat *segmented* kepada ASN, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tidak terkait dengan pelayanan dasar kepada publik sebagai masyarakat dalam arti luas. Dengan kata lain, BKPSDM merupakan salah satu lembaga teknis penunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keluaran, dampak, dan manfaat pada aspek sosial dan ekonomi memang tidak dapat diukur dan dianalisis secara langsung melalui Renja Perangkat Daerah karena alasan sebagaimana telah dikemukakan, tetapi harus diakui bahwa BKPSDM berperan penting dalam pemberian layanan kepegawaian dan pengembangan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) sebagai ASN. Sehingga diharapkan aparatur tersebut dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan serta memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk akselerasi pembangunan daerah dan memberikan pelayanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan yang dibutuhkan. Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen Renja didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan dimaksud dalam perkembangannya telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Proses penyusunan Renja telah melalui tahapan yang dipersyaratkan dan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Sehingga keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang ada pada BKPSDM Kabupaten Balangan. Dengan demikian, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dasar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD BKPSDM. RKA SKPD tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan pengelolaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kesepahaman dan penetapan kaidah-kaidah penjabaran Renja yang terdiri dari:

1. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan, dan jumlah anggaran Tahun 2023. RKA tersebut selanjutnya akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sebagai

dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2023;

2. Pimpinan dan pihak-pihak terkait pada BKPSDM agar melakukan monitoring pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran yang direncanakan serta mengambil tindakan korektif yang dibutuhkan dalam rangka menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan kegiatan dimaksud; dan
3. Pimpinan dan pihak-pihak terkait pada BKPSDM Kabupaten Balangan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2023 sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mempedomani ketentuan peraturan perundangan berlaku.

Keberadaan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 diharapkan dapat membuat pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah serta target program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi lebih fokus, terarah, dan terintegrasi. Sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kelompok yang menjadi sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan serta bagi pengguna layanan BKPSDM. Di samping itu, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan harus tetap berpegang teguh pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Paringin, Juli 2022

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



H. SUFERIANNOR, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009